

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara selalu diikuti dengan perkembangan dari berbagai aspek yang terus meningkat pesat dan rumit. Selain pembangunan ekonomi, pembangunan dari sektor lain juga turut dilakukan, dan diberi kewenangan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan sesuai dengan kehendak dan kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan hakekat otonomi daerah yang berkenaan dengan pelimpahan wewenang pengambilan keputusan kebijakan, pengelolaan dana publik dan pengaturan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat maka peranan data keuangan daerah sangat dibutuhkan untuk mengidentifikasi sumber-sumber pembiayaan daerah serta jenis dan besar belanja yang harus dikeluarkan agar perencanaan keuangan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Data keuangan daerah yang memberikan gambaran statistik perkembangan anggaran dan realisasi, baik

penerimaan maupun pengeluaran dan analisa terhadapnya merupakan informasi yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah untuk melihat kemampuan/ kemandirian daerah (Yuliati, 2001:22). Seiring dengan perkembangan tersebut maka berbagai upaya dilakukan oleh setiap lembaga untuk membenahi kinerjanya. Hal ini turut berdampak pada instansi-instansi pemerintah sebagai lembaga pemerintah yang bertujuan meningkatkan kinerja untuk melakukan penyesuaian terhadap perkembangan yang semakin pesat ini agar setiap tujuan dapat terlaksana dengan baik dan memperkecil resiko kesalahan yang dapat memperlambat kinerja.

Dalam mengendalikan organisasi perlu membuat perencanaan yang akurat untuk mencapai tujuan. Menurut Marconi, Anggaran sebagai alat manajemen untuk keperluan perencanaan dan pengendalian mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan ini diukur dari segi manfaat yang ingin diperoleh dari penggunaan sistem dalam pelaksanaannya. Semakin banyak dan rumit manfaat yang dituju, semakin banyak persyaratan yang dituntut di dalam persiapan dan penyusunannya.

Menurut Bastian (2002:58) kas adalah uang tunai yang di persembahkan dengan saldo rekening giro yang tidak dibatasi penggunaannya untuk membiayai kegiatan entitas pemerintah daerah. Kas merupakan salah satu aktiva yang dimiliki oleh setiap SKPD yang ada selain aktiva lainnya. Dibandingkan dengan aktiva lainnya, kas memiliki sifat yang sangat likuid, anggaran kas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini

untuk menjamin ketersediaan dana pada saat dibutuhkan, sehingga melaksanakan program/kegiatan yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan publik dan pemerintahan dapat berjalan lancar seperti yang direncanakan, sesuai dengan jadwal pelaksanaan dan target kinerja. Menurut Permendagri No.21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran kas menggambarkan rencana penerimaan dan pengeluaran selama satu periode anggaran (umumnya satu tahun, mulai 1 Januari s.d. 31 Desember). Pada pemerintahan daerah, anggaran kas dibuat oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) dan SKPD. Karena SKPD merupakan bagian dari Pemda, maka agregasi dari anggaran kas seluruh SKPD akan menjadi anggaran kas Pemda. Anggaran Kas diperlukan sebagai sarana pengatur dan untuk mengharmoniskan pemasukan pendapatan daerah di satu pihak dan kebutuhan-kebutuhan dana untuk belanja dan pembiayaan di pihak lain(Mahmudi 2010:121). Tanpa anggaran kas, skedul pelaksanaan kegiatan oleh SKPD kemungkinan tidak lancar karena adanya ketidakpastian dalam pencairan dananya.

Selain itu juga kas yang ada pada SKPD juga bisa di salah gunakan dalam arti pencurian atau penggelapan terhadap kas. Pengelolaan atau manajemen kas bertujuan untuk menghindarkan SKPD dari kerugian-kerugian yang disebutkan di atas (Mahmudi 2010:116). Anggaran kas merupakan hal yang penting karena menyangkut besarnya jumlah kas yang dibutuhkan oleh SKPD untuk menjalankan kegiatannya sehari-hari. Besar

kecilnya kas yang disimpan menentukan tingkat likuiditas suatu SKPD, apabila kas dalam suatu SKPD menyimpan terlalu sedikit kas maka akan mendapatkan kesulitan likuiditas karena memerlukan kas untuk memnuhi kegiatan operasionalnya atau untuk membayar biaya lain-lain.

Penyusunan anggaran merupakan siklus penting bagi perusahaan dan lembaga yaitu untuk membantu pelaksanaan dalam merencanakan kegiatan dan memberikan gambaran awal seberapa besar dana yang akan dikeluarkan untuk mewujudkan kegiatan tersebut yang dimonitori oleh pusat pertanggungjawaban sehingga penyimpangan-penyimpangan dapat diminimalisasi. Pengendalian sangatlah penting dalam proses penganggaran, karena pengawasan diperlukan untuk mengevaluasi kinerja karyawan yang memerlukan perbaikan atas setiap aktivitas yang dilakukan perusahaan dan lembaga, apakah telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengendalian dicapai melalui pelaporan kemajuan dan pembelajaran aktual dibandingkan dengan perencanaan yang terus menerus. Dengan demikian, apa yang menjadi tujuan perusahaan atau lembaga akan dapat dicapai dengan semaksimal mungkin.

Dinas Sosial juga dihadapkan pada pemikiran terciptanya proses penyusunan anggaran kas yang dibuat secara efektif dan efisien dan tidak akan terlepas dari masalah pengendalian kas, yaitu terletak pada penerimaan dan pengeluaran kas. Perencanaan dilakukan terhadap penerimaan dan pengeluaran di SKPD, karena hal ini akan menyangkut besarnya jumlah kas yang dibutuhkan oleh SKPD. Anggaran merupakan suatu bentuk perencanaan

tertulis yang dinyatakan dalam satuan uang atau kuantitas lainnya dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

Berikut ini akan disajikan Lapoan realisasi anggaran Dinas sosial Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2015.

Tabel 1.1 Laporan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2014-2015

NO. REKENING	URAIAN	JUMLAH DANA (RP.)	REALISASI 2014		JUMLAH DANA (RP)	REALISASI (2015)	
			KEU. (RP)	(%)		KEU. (RP)	(%)
1	URUSAN WAJIB						
1 . 13	SOSIAL						
1 . 13 . 1	DINAS SOSIAL						
5	BELANJA	5.679.270.370	5.014.775.286	87,17	6.980.022.086	6.097.467.738	87,36
5 . 1 .	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.589.200.370	1.627.649.729	102,42	1.751.038.086	1.735.252.289	99,10
5 . 1 . 1	BELANJA PEGAWAI	1.589.200.370	1.627.649.729	102	1.751.038.086	1.735.252.289	99,10
5 . 1 . 1 . 01	Gaji dan Tunjangan	1.251.640.370	1.345.220.979	107	1.451.038.086	1.448.908.539	99,85
5 . 1 . 1 . 02	Tambahan Penghasilan PNS	337.560.000	282.428.750	84	300.000.000	286.343.750	95,45
5 . 2	BELANJA LANGSUNG	4.090.070.000	3.323.173.557	81,25	5.228.984.000	4.362.215.449	83,42
1.13 . 1.13.01.01 . 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	471.616.000	406.572.219	86,21	684.554.500	533.591.577	77,95
1.13 . 1.13.01.01 . 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	91.604.000	86.433.438	94,36	645.329.000	616.987.372	95,61
1.13 . 1.13.01.01 . 03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur				31.450.000	31.450.000	100,00
1.13 . 1.13.01.01 . 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100.000.000	99.998.700	100	60.055.000	47.120.000	78,46
1.13 . 1.13.01.01 . 15	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.605.192.700	1.193.335.600	74,34	1.560.619.500	1.068.914.900	68,49
1.13 . 1.13.01.01 . 16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1.195.209.300	915.785.600	76,62	1.298.987.000	1.228.747.000	94,59
1.13 . 1.13.01.01 . 17	Program Pembinaan anak terlantar				176.956.000	159.856.000	90,34
1.13 . 1.13.01.01 . 19	Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	118.925.000	118.925.000	100	153.337.000	135.851.300	88,60
1.13 . 1.13.01.01 . 20	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	34.400.000	34.400.000	100	62.380.000	55.580.000	93,91
1.13 . 1.13.01.01 . 21	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	473.123.000	467.723.000	98,86	555.316.000	481.117.300	86,64
JUMLAH		5.679.270.370	4.950.823.286	87,17	6.980.022.086	6.097.467.738	87,36

Sumber Data : Dinas Sosial Kabupaten Kupang 2016

Berdasarkan Tabel di atas terlihat realisasi anggaran pada Tahun 2015 meningkat 0,19% atau senilai Rp. 1.146.644.452, walaupun demikian sisa anggaran pada tahun 2015 lebih besar daripada Tahun 2014. Pada tahun 2014 sisa anggaran Rp. 728.447.084. Dan pada Tahun 2015 sisa Anggaran Rp.882.554.348. Pada Tahun 2014 tidak ada realisasi anggaran yang berada di bawah 70% , namun hal tersebut terjadi pada tahun 2015. Pada tahun 2015, Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya menempati posisi realisasi terendah yakni mencapai 68,49%. Hal yang berbeda terjadi pada tahun 2014, di tahun ini pada Belanja Tidak Langsung untuk rekening Gaji dan Tunjangan realisasinya berada di atas 100% tepatnya mencapai 107%.

Setelah melakukan perencanaan, manajemen kas dalam SKPD juga harus melakukan pengendalian. Pengendalian dilakukan dengan cara membandingkan antara anggaran dan realisasinya (Mardiasmo 2002:182). Dasar dari pengendalian adalah apa yang telah direncanakan sehingga pengendalian yang efektif akan tercapai apabila terdapat perencanaan yang baik dan tingkat kegiatan yang direncanakan dapat dicapai. Pengendalian dilakukan terhadap penerimaan dan pengeluaran kas agar pelaksanaan tidak menyimpang dari yang direncanakan. Penyimpangan yang dimaksud dalam hal ini adalah kelebihan anggaran maupun kekurangan Anggaran.

Anggaran kas memberikan pemikiran mengenai kas dengan jalan memiliki alternatif yang paling tepat mengenai penyediaan dan

penggunaannya berhubung masih tersedianya waktu yang cukup. Hal tersebut terjadi karena manajemen telah memberikan cara-cara untuk menutupi kekurangan kas serta cara penggunaan kas. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi SKPD untuk menyusun anggaran kas sebagai alat bantu manajemen untuk menunjang fungsi pengendalian kas agar penyimpangan seperti yang terjadi di Dinas Sosial Kabupaten Kupang pada tahun 2014 dan 2015, tidak terjadi lagi pada tahun berikutnya pada instansi Tersebut maupun pada instansi lainnya. Secara normatif, anggaran belanja merupakan batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilakukan.

Jika realisasi Belanja lebih besar dari jumlah yang dianggarkan maka hal itu mengindikasikan adanya pengendalian anggaran yang kurang baik. Namun, harus dikaji lebih lanjut apakah realisasi belanja yang lebih kecil dari anggaran tersebut disebabkan karena pengendalian yang baik ataukah justru sebaliknya pengendalian yang buruk, jika hal itu karena pengendalian anggaran yang ketat yang dilakukan pemerintah daerah, maka hal itu memang benar-benar merupakan prestasi tetapi jika tidak terserapnya anggaran belanja tersebut disebabkan karena ada program yang tidak dilaksanakan atau karena penetapan harga satuan yang jauh melebihi nilai pasar, maka hal itu bukan menunjukkan kinerja anggaran yang baik, sehingga penghematan belanja yang di tampilkan merupakan prestasi semu. Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Penyerapan Anggaran Kas sebagai Alat Pengendalian Kas pada Dinas Sosial Kabupaten Kupang.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yaitu

1. Apakah penyerapan anggaran kas pada Dinas Sosial Kabupaten Kupang telah berfungsi sebagai alat pengendalian?
2. Bagaimana mekanisme pengendalian kas pada Dinas Sosial Kabupaten Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:

1. Mengetahui penyerapan anggaran kas pada Dinas Sosial Kabupaten Kupang.
2. Mengetahui mekanisme pengendalian kas pada Dinas Sosial Kabupaten Kupang.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat bagi:

1. Bagi penulis, diharapkan dapat lebih memahami tentang penyusunan anggaran kas, pengendalian terhadap kas SKPD dan peranan anggaran kas sebagai alat Bantu bagi manajemen dalam menentukan kebijakan-kebijakan serta untuk melengkapi dan memahami pengetahuan teoritis yang diperoleh dari perkuliahan dan dari literatur-literatur.
2. Bagi Instansi terkait, sebagai bahan masukan bagi lembaga sehingga dapat lebih memperhatikan dan mengetahui bagaimana Fungsi Anggaran sebagai alat pengendalian, agar Dinas dapat melaksanakan aktivitas dengan lebih efektif dan efisien, serta lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, serta

sebagai bahan rujukan atau sumber informasi bagi yang ingin mempelajari dan membahas lebih jauh tentang anggaran.